

SKRIPSI

**ASPEK KONTRAKTUAL PENGADAAN PUPUK NON SUBSIDI MELALUI
PENDAMPINGAN HUKUM (LEGAL ASSISTANCE) OLEH JAKSA
PENGACARA NEGARA (STUDI KASUS DI PT PERKEBUNAN
NUSANTARA III)**



Oleh :

MAZAYA SHAUMY KHAIRANA

NIM. 031911133119

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AIRLANGGA

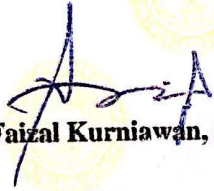
2022

**ASPEK KONTRAKTUAL PENGADAAN PUPUK NON SUBSIDI MELALUI
PENDAMPINGAN HUKUM (LEGAL ASSISTANCE) OLEH JAKSA
PENGACARA NEGARA (STUDI KASUS DI PT PERKEBUNAN
NUSANTARA IID)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Dosen Pembimbing,


Dr. Faizal Kurniawan, S.H., M.H.LLM

Penyusun,


Mazaya Shaumy Khairana

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

2022

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Tim Penguji pada
tanggal 22 Juli 2022

Tim Penguji Skripsi:

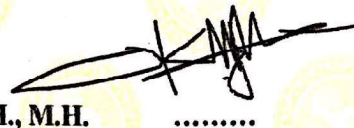
Ketua : ERNI AGUSTIN, S.H., LL.M.



Anggota : 1. Dr. FAIZAL KURNIAWAN, S.H., M.H., LL.M



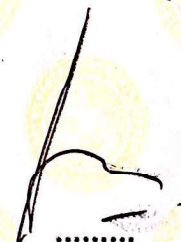
2. BAGUS OKTAFIAN ABRIANTO, S.H., M.H.



3. RIZKY AMALIA, S.H., M.H.



4. SAPTA APRILIANTO, S.H., M.H., LL.M.



PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mazaya Shaumy Khairana

NIM : 031911133119

Bidang Minar : Bisnis

Judul Skripsi : ASPEK KONTRAKTUAL PENGADAAN PUPUK NON SUBSIDI
MELALUI PENDAMPINGAN HUKUM (LEGAL ASSISTANCE)
OLEH JAKSA PENGACARA NEGARA (STUDI KASUS DI PT
PERKEBUNAN NUSANTARA III)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 20 Desember 2022

Yang membuat Pernyataan,



MAZAYA SHAUMY KHAIRANA

NIM. 031911133119

MOTTO

“ SELALU CANTIK DAN TETAP SEMANGAT”

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“ASPEK KONTRAKTUAL PENGADAAN PUPUK NON SUBSIDI MELALUI PENDAMPINGAN HUKUM (LEGAL ASSISTANCE) OLEH JAKSA PENGACARA NEGARA (STUDI KASUS DI PT PERKEBUNAN NUSANTARA III)”** tepat waktu sebagai pemenuhan syarat kelulusan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum di Universitas Airlangga. Selain itu, skripsi ini juga bertujuan untuk mengetahui fungsi dan wewenang dari Pendampingan Hukum yang dan mengkaji bentuk/model pendampingan hukum yang diberikan oleh Jaksa Pengacara Negara dalam kegiatan Pengadaan Barang atau Jasa.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini dengan ketulusan hati penulis menyampaikan terima kasih setulus-tulusnya kepada:

1. Kedua orang tua penulis, Ayah, Wahyudi, Mama, Sekti Anggraini, Nenek, Nurmala, Saudara Kandung, Muhammad Akmal Risyad yang telah mendidik dan mendukung penulis.
2. Bapak Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

3. Bapak Dr. Suparto Wijoyo, S.H., M.Hum. selaku Dosen Wali penulis yang telah bersedia membimbing penulis selama menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
4. Bapak Dr. Faizal Kurniawan, S.H., M.H., LL.M. selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam Menyusun skripsi ini
5. Ibu Erni Agustin, S.H., LL.M. selaku ketua penguji sidang skripsi saya beserta anggota penguji Bapak Bagus Oktafian Abrianto, S.H., M.H., Ibu Rizky Amalia, S.H., M.H., dan Bapak Sapta Aprilianto, S.H., M.H., LL.M.
6. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun, Nanik Kushartanti, SH. MH, Legal Officer PTPN III, Sandes Sinaga, SH., Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya, Danang Suryo Wibowo, SH., LL.M., Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, Bima Suprayoga, SH.,M.Hum., Koordinator pada Kejati Jambi, Bagus Priyonggo, SH., MH., Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bogor,Sekti Anggaraini, SH. MH. Selaku narasumber yang telah membantu dalam penulisan skripsi.
7. Sahabat penulis selama dibangku perkuliahan Betsy Prajna Paramita, Istianah, ,Nabila Jasmine Ardyanto Putri ,Dinda Ayu Alfiana, , Arlitasya Ramandhani, Khansa Kamilah, Novaniaa Aulia Rahma, serta rekan-rekan lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu atas segala dukungannya sebagai teman baik.
8. Sahabat penulis di SMA yang telah mendukung penulis sampai sekarang Namira, Anggi Frima Damayanti, Cherryl triana, Putri julisa Anwari, Jelita

puspitasari, Kanya endah kagurnita, Siti Padilah, Fathiyya Azzahra, Alfhiranissa Effendi, Wikan Jananuragautami.

9. Chiko, Jaylani, Niki, Amel, Lilo, Bule, Sapi, dan Kempot selaku peliharaan kucing penulis yang selalu menemani penulis saat menulis skripsi ini dan selalu bermain bersama penulis ketika penulis jenuh.
10. BTS, Treasure dan Yura Yunita selaku pemusik kesukaan Penulis, yang selalau menghibur penulis dengan karya-karyanya selama mengerjakan skripsi ini hingga selesai.
11. Seluruh Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, semoga penelitian dalam skripsi ini tidak berhenti sampai di perpustakaan Fakultas Hukum, tetapi penelitian yang terbuka bagi masyarakat luas dan menjadi dorongan untuk terus maju kedepannya.

Surabaya

Penulis,

MAZAYA SHAUMY KHAIRANA

NIM. 031911133119

ABSTRAK

Kejaksaan Republik Indonesia merupakan unsur aparatur pemerintah dalam bidang penegakan hukum, yang tidak hanya mengemban tugas-tugas sebagai penuntut umum dalam perkara pidana, melainkan dibebani tugas-tugas lain dalam bidang Perdata maupun Tata Usaha Negara. Dalam skripsi ini isu hukum yang diangkat adalah mengenai Pendampingan Hukum atau Legal Assistance yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara serta membahas tentang bentuk pendampingan hukum yang diberikan. Adapun metode penelitian hukum yang digunakan dalam skripsi ini adalah tipe penelitian yuridis normative dengan menggunakan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui fungsi dan wewenang dari Pendampingan Hukum yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara kepada PT. Perkebunan Nusantara III dalam hal pengadaan pupuk non subsidi serta mengkaji bentuk/model pendampingan hukum yang diberikan oleh Jaksa Pengacara Negara dalam kegiatan Pengadaan pupuk non subsidi oleh PT. Perkebunan Nusantara III. Berdasarkan hasil Analisa yang dilakukan, disimpulkan bahwa pendampingan hukum yang diberikan kepada PT Perkebunan Nusantara III dalam kontrak pengadaan dilakukan sebagai bentuk pencegahan atau Tindakan preventif agar tidak terjadi pelanggaran hukum dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh PT Perkebunan Nusantara III.

Kata Kunci: Pengadaan Barang/Jasa, Jaksa Pengacara Negara, Pendampingan Hukum, BUMN, PT Perkebunan Nusantara

ABSTRACT

The Attorney General's Office of the Republic of Indonesia is one element of the government apparatus in the field of law enforcement which not only carries out its duties as a public prosecutor in criminal cases, but also has other duties in this field. Civil and State Administration. In this thesis the legal issues raised are regarding Legal Assistance carried out by the State Attorney's Office and discuss the forms of legal assistance provided. The legal research method used in this thesis is normative juridical research with a conceptual and statutory approach. This thesis aims to determine the function and authority of the Legal Aid provided by the Attorney General against PT. Perkebunan Nusantara III in terms of procuring non-subsidized fertilizers and reviewing the form/model of legal assistance provided by the Attorney General's Office in procuring non-subsidized fertilizers by PT. Nusantara Plantations III. Based on the results of the analysis carried out, it was concluded that the legal assistance provided to PT Perkebunan Nusantara III in the procurement contract was carried out as a form of prevention or preventive action to prevent legal violations in the procurement of goods. goods and services provided by PT Perkebunan Nusantara III.

Keywords: Procurement of goods/services, Attorney, Legal Aid, BUMN, PT Perkebunan Nusantara

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70)

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106)

Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 67)

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-08/MBU/12/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-15/MBU/2012 tentang Pedoman Umum Pelaksana Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1613)

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pendoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1364)

Peraturan Jaksa Agung RI Nomor 040/A/J.A/12/2010 tanggal 13 Desember 2010 tentang Standar Operating Prosedur (SOP) Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Wewenang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia No : 018/A/J.A/07/2014 Tentang Standar Operasional Prosedur Pada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara. (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 1000)

Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER-025/A/JA/11/2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1727)

Surat Edaran Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor: SE-009/G/Gs.2/04/2017 Tentang Petunjukan Teknis Pelaksanaan Pemberian Pertimbangan Hukum Berupa Pendapat Hukum (Legal Opinion), Pendampingan Hukum (Legal Assistance), dan Audit Hukum (Legal Audit) Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-025/A/JA/AA/2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan

Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain,
dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

DAFTAR ISI

SKRIPSI	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xi
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1,3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
1.5 Metode Penelitian.....	12
1.5.1. Tipe Penelitian Hukum.....	13
1.5.2. Pendekatan Masalah.....	13
1.5.3. Sumber Bahan Hukum (<i>legal sources</i>)	14
1.6 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum.....	18
1.7 Analisis Bahan Hukum	19
1.8 Sistematika Penulisan	19
BAB II KEWENANGAN JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM MELAKUKAN PENDAMPINGAN HUKUM (LEGAL ASSISTANCE) PADA TAHAP PENYUSUNAN KONTRAK PENGADAAN PUPUK NON-SUBSIDI YANG DILAKUKAN OLEH PT PERKEBUNAN NUSANTARA III	22
2.1 Kewenangan Jaksa Pengacara Negara dalam Melakukan Pendampingan Hukum Pada Instansi Pemerintah, BUMN/BUMD.....	22
2.1.1. Pendampingan Hukum (Legal Assistance) Oleh Jaksa Pengacara Negara	22
2.1.2. Pendampingan Hukum Pada Instansi Pemerintah	30

2.2 Peran Pendampingan Hukum dalam Tahap Penyusunan Draft Kontrak Pengadaan Barang/Jasa pada BUMN (Pengadaan Pupuk Non-Subsidi oleh PT Perkebunan Nusantara III).....	37
2.3 Batasan Kewenangan Jaksa Pengacara Negara dalam Pendampingan Hukum Pada Pengadaan Pupuk Non-Subsidi oleh PT Perkebunan Nusantara III	41
BAB III BENTUK/MODEL PENDAMPINGAN HUKUM DILAKUKAN JAKSA PENGACARA NEGARA PADA PENGADAAN PUPUK NON-SUBSIDI OLEH PT PERKEBUNAN NUSANTARA III	47
3.1 Tahapan Pendampingan Hukum Jaksa Pengacara Negara Pada Pengadaan Pupuk Non Subsidi Oleh PT Perkebunan Nusantara III	47
3.1.1 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021	47
3.1.2 Surat Edaran Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor: SE-009/G/Gs.2/04/2017	50
3.1.3 Pelaksanaan Pendampingan Hukum Pada Pengadaan Pupuk PT Perkebunan Nusantara III.....	53
3.2 Bentuk/Model Pendampingan Hukum Jaksa Pengacara Negara Pada Pengadaan Pupuk Non-Subsidi oleh PT Perkebunan Nusantara III.....	60
3.3 Manfaat Pendampingan Hukum Jaksa Pengacara Negara Pada Pengadaan Barang/Jasa	63
BAB IV	68
PENUTUP	68
4.1. KESIMPULAN	68
4.2. SARAN	69
DAFTAR BACAAN.....	71